
Prosiding Paper Competition Accounting Festival

EKONOMI BERKELANJUTAN: PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM REVOLUSI PEMBANGUNAN

Muhamad Reza Pahlevi¹ Diah Amelia Azzahra² Yeni Farida³

Universitas Muhammadiyah Semarang

Pahlevireza767@gmail.com¹, diahameliaazzahra07@gmail.com², nafarida582@gmail.com³

ARTICLE INFO

Keywords: *accountability, effectiveness, good corporate governance, sustainable initiatives, sustainable economy*

Paper type

Artikel Ilmiah

ABSTRACT

A sustainable economy is an economy that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. So fundamental changes are needed in business operations and natural resource management. Good GCG can contribute to a sustainable economy in many ways, to increase company transparency and accountability. Good GCG ensures that companies disclose financial and operational information transparently to stakeholders. A sustainable economy has become a major focus in formulating global development policies, with the aim of achieving a balance between economic growth, environmental sustainability and social justice. This research explores the important role of Good Corporate Governance (GCG) in shaping the sustainable development revolution. GCG is key in ensuring that business practices and company policies not only benefit internal stakeholders, but also have a positive impact on society and the surrounding environment. Through the application of GCG principles, companies are able to integrate economic, social and environmental aspects into their business strategy. GCG creates a foundation for transparency, accountability and effective participation, building public trust and reducing corporate financial and reputational risks. This research also discusses the role of stakeholders, including government, investors and civil society, in encouraging sustainable GCG practices. The results of this research provide an in-depth view of how GCG is not just regulatory compliance, but a key element in creating a sustainable economy.

PENDAHULUAN

Pentingnya Good Corporate Governance (GCG) untuk kesuksesan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat tidak dapat dipungkiri. Perkembangan ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai kegagalan korporasi (corporate failures) sebagai akibat dari buruknya tata kelola perusahaan. GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG.

Ekonomi berkelanjutan sangat mempengaruhi proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan dapat mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pada era globalisasi ini, tantangan Pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi fokus utama bagi negara – negara yang ingin mencapai pertumbuhan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ekonomi, pembangunan berkelanjutan berarti pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif, serta tidak merusak lingkungan. Untuk mencapai tujuan ini, peran Perusahaan sangat penting karena Perusahaan harus menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik atau dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) agar dapat beroperasi secara berkelanjutan dan berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi.

GCG merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara Perusahaan, pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. GCG bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan dikelola secara transparan, bertanggung jawab dan akuntabel. Dalam penerapannya, GCG memiliki beberapa manfaat bagi pembangunan berkelanjutan yaitu meningkatkan kepercayaan dan reputasi Perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan, dan mengurangi risiko hukum, serta meningkatkan daya saing Perusahaan. Perusahaan yang mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan akan dapat meningkatkan nilai Perusahaan karena dukungan yang diperoleh dari stakeholders baik dari internal ataupun eksternal. GCG bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan kunci untuk menciptakan nilai jangka panjang.

Dalam konteks revolusi pembangunan, penerapan GCG menjadi semakin penting, revolusi pembangunan ditandai dengan perubahan yang cepat dan dinamis dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perubahan ini menimbulkan berbagai tantangan dan risiko baru bagi Perusahaan. Pertanyaan yang dapat dibahas dalam pembahasan selanjutnya yaitu tentang kompleksitas tantangan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pertanyaan – pertanyaan kunci muncul seputar prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*, implementasinya dalam struktur Perusahaan, dan dampak positifnya terhadap pembangunan berkelanjutan. Rumusan masalah ini melibatkan pertimbangan terhadap relevansi prinsip – prinsip GCG dengan konteks Pembangunan berkelanjutan, strategi konkret dalam menerapkan

GCG di Perusahaan, serta manfaat yang diterapkan bagi keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan bertanggung jawab. Dengan memfokuskan rumusan masalah pada ketiga aspek ini, penelitian ini diarahkan untuk mendalami kontribusi GCG sebagai landasan utama dalam merespons dan mendukung revolusi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembahasan terhadap pertanyaan – pertanyaan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran GCG dalam revolusi pembangunan.

Penelitian mengenai Ekonomi Berkelanjutan, Peran *Good Corporate Governance* Dalam Revolusi Pembangunan bertujuan untuk menjelaskan peran GCG dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh GCG terhadap kinerja Perusahaan, daya saing Perusahaan, dan perekonomian nasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana GCG dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi Pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

GCG dapat didekati dari disiplin ilmu yang berbeda termasuk makro ekonomi, teori organisasi, teori informasi, akuntansi, ekonomi, manajemen, psikologi, sosiologi, dan politik. Definisi GCG menurut Bank Dunia adalah aturan, standar, dan organisasi ekonomi yang mengatur perilaku pemilik bisnis, dan manajer, serta rincian dan uraian tegas dan wewenang serta tanggung jawab mereka kepada investor (pemegang saham dan kreditor). Tujuan utama GCG adalah menciptakan sistem pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya Perusahaan dan mendorong pertumbuhan Perusahaan. Selain itu Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang diambil dari berbagai dari mengumpulkan data. Tujuan dari tinjauan literatur artikel ini adalah untuk mengkaji peran GCG dalam penerapan perekonomian berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penekatan tinjauan Pustaka. Bahan penelitian diperoleh dari publikasi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen – dokumen ini digunakan untuk menganalisis isi, identifikasi tema, dan argumentasi yang relevan. Manajemen Perusahaan dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari proses dan struktur (mekanisme) yang mengatur dan mengkoordinasikan berbagai bagian bisnis perusahaan.

Jabatan digunakan untuk membimbing dan mengarahkan kegiatan bisnis yang bertujuan mencapai tujuan Perusahaan, menyelaraskan perilaku Perusahaan dengan harapan masyarakat, dan menjaga akuntabilitas Perusahaan kepada pemegang saham. Struktur tersebut menetapkan pembagian hak dan tanggung jawab antara berbagai aktor organisasi, seperti komisaris, direktur, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, dan menjelaskan aturan dan prosedur pengambilan keputusan dalam hubungan bisnis. Empat komponen utama konsep GCG ini adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Keempat komponen ini penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Keempat unsur tersebut menjadi acuan untuk menentukan tingkat kepengurusan perusahaan dan setiap langkah yang diambil oleh pegawai, yaitu hak untuk menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah yang terbaik bagi kepentingan semua pihak.

Banyak pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor dan masyarakat luas. Transparansi sebagai kewajiban untuk menjamin ketersediaan dan keterbukaan informasi penting mengenai status keuangan, pengelolaan dan kepemilikan perusahaan kepada pemangku kepentingan secara akurat, jelas dan tepat waktu. Pelaporan, yang menjamin adanya mekanisme, peran manajemen profesional, tanggung jawab atas semua keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Pelaporan yang memuat gambaran jelas mengenai peran semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan nilai-nilai social.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Good Corporate Governance atau dikenal dengan nama Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (atau disebut "GCG") muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep GCG namun dilatar belakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, ada banyak sekali mengenai definisi tentang GCG. menurut *World Bank* mendefinisikan *Good Governance* sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi yang sepenuhnya dilakukan untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Adapun menurut *Robert C. Clark*, seorang ahli hukum perusahaan, berpendapat bahwa dalam tata kelola perusahaan yang baik, kepentingan semua pemangku kepentingan perusahaan harus dihormati dan dipertimbangkan. Ini termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan lingkungan. Bisa disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Melalui penerapan GCG, perusahaan dapat memperoleh manfaat seperti pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, daya tarik bagi investor, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan strategi perusahaan. Dengan demikian, penting bagi setiap perusahaan untuk menerapkan GCG yang baik dalam rangka mencapai pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang.

Penerapan GCG sangatlah penting bagi perusahaan dan dapat mengembangkan perekonomian bagi pemerintahan serta meningkatkan pembangunan berkelanjutan bagi negara, adapun *Corporate Governance* cenderung akan memperbaiki kinerja dan bukannya menghambat perkembangan Perusahaan, tidak hanya menerapkan sistem GCG tetapi juga mengetahui prinsip-prinsip yang harus dilihat untuk meningkatkan keyakinan investor domestik terhadap perusahaan.

Di dibawah ini manfaat dalam menerapkan prinsip-prinsip terhadap sistem *Good Corporate Governance*:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya

hal tersebut.

2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para (*stakeholder*) para pihak yang berkepentingan, dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Peraturan mengenai penerapan GCG banyak mengatur tentang Perusahaan, adapun beberapa contoh aturan penerapan GCG dalam badan Perusahaan pemerintahan, Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN dalam Effendi (2009), menyatakan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M-PM.PBUMN/2000 tentang pengembangan praktek GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), menjelaskan bahwa GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Penerapan GCG yang efektif membutuhkan kombinasi dari faktor-faktor internal dan eksternal yang mendukung. Penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan GCG di perusahaan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan praktik GCG, mereka memiliki 2 faktor penerapan prinsip GCG, yaitu faktor eksternal dan internal, antara lain yaitu seperti dibawah ini:

a. Faktor Eksternal

1. Terdapatnya sistem hukum yang baik.
2. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik / lembaga pemerintahan.
3. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*).
4. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat.
5. Semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

b. Faktor Internal

1. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG.
2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan

nilai-nilai GCG.

3. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
4. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan.
5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik.

Faktor-faktor yang disebutkan di atas tidak bersifat menyeluruh dan dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing Perusahaan dan penting bagi perusahaan untuk melakukan penilaian dan analisis yang mendalam untuk menentukan faktor-faktor yang paling relevan dengan perusahaan mereka.

Teori Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

1. *Agency Theory* (teori Keagenan)

Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan antara pemilik (principal) dan manajer (agen). Hubungan keagenan muncul ketika salah satu pihak (principal) mempekerjakan pihak lain (agen) untuk menjalankan fungsinya. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai berikut: "Hubungan keagenan adalah kontrak di mana satu atau lebih orang (principal) mengikat orang lain (agen) untuk melakukan suatu layanan atas nama mereka dengan otorisasi layanan tertentu. Teori keagenan didasarkan pada pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Pemilik dan manajer berusaha memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Jensen dan Meckling berpendapat bahwa manajemen sebagai wakil pemegang saham (principal) tidak selalu bertindak untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Hal inilah yang menyebabkan masalah representasi. Masalah keagenan ini kemudian menimbulkan biaya yang disebut biaya keagenan. Seiring berjalannya waktu, permasalahan tersebut akan terus bertambah parah karena adanya keterbatasan dari pihak pemegang saham dalam memantau jalannya operasional dealer sehari-hari untuk memastikan bahwa manajemen akan selalu bertindak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan dan keinginan pemegang saham. Namun permasalahan keagenan dapat diminimalisir melalui pengelolaan bisnis yang baik melalui tata kelola perusahaan yang baik. Teori keagenan memandang inti bisnis sebagai hubungan kontraktual dengan semua pihak yaitu karyawan, kreditor, pelanggan, dan lain-lain. Artinya, menurut teori keagenan, korporasi bukanlah suatu perseorangan melainkan suatu struktur hukum yang berfungsi sebagai pusat proses penyelesaian berbagai tujuan individu dalam hubungan kontrak.

2. *Stewardship Theory*

Stewardship Theory atau teori tata kelola adalah keselarasan antara pemilik modal (principal) dan pengelola modal (manajer) untuk mencapai tujuan bersama, namun secara tidak langsung mencerminkan cara perencanaan. Akuntansi menciptakan model tata kelola dan hubungan komunikasi antara pemegang saham dan manajemen, atau bisa juga terjadi antara pimpinan senior dan manajemen. pemimpin lain di bawahnya dalam suatu organisasi bisnis dengan

mekanisme situasional yang mencakup filosofi manajemen dan perbedaan budaya dalam organisasi dan kemampuan kepemimpinan untuk mencapai tujuan bersama tanpa menghalangi keuntungan kedua belah pihak. Menurut Murwaningsari (2009), teori ini menggambarkan eratnya hubungan antara kesuksesan organisasi dan kepuasan. Teori manajemen didasarkan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia yaitu individu yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan jujur. Pemerintah sebagai pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan masyarakat sebagai pemilik utama. Kontrak berdasarkan kepercayaan dibuat antara pemerintah (manajer) dan masyarakat (prinsipal), yang secara kolektif selaras dengan tujuan organisasi. Raharjo juga berpendapat bahwa teori manajemen berakar pada psikologi dan sosiologi yang bertujuan untuk menjelaskan manajer sebagai pelayan (manajer). Teori manajemen menggambarkan situasi manajemen yang tidak didorong oleh tujuan dan kepentingan pribadi tetapi cenderung lebih fokus pada hasil-hasil utama, khususnya kepentingan organisasi. Dalam teori manajemen, manajer bertindak berdasarkan kepentingan umum. Jika kepentingan pengelola dan pemilik tidak sama, maka pengelola akan berusaha bekerja sama dan tidak bertentangan dengan keduanya. Teori manajemen ini berasumsi bahwa terdapat hubungan yang baik antara keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik. Penjelasan ini tidak berarti bahwa manajer toko menunjukkan ketegangan antara kebutuhan pribadi dan tujuan organisasi dan percaya bahwa dengan bekerja untuk organisasi, kebutuhan pribadi akan terpenuhi. Perwakilan serikat pekerja percaya bahwa kepentingan mereka akan selaras dengan kepentingan organisasi dan pemiliknya. Oleh karena itu, kepentingan dan motif mencari keuntungan manajer diarahkan langsung pada organisasi dan bukan pada tujuan pribadi.

3. *Trade Off Theory*

Teori trade-off mengemukakan bahwa struktur keuangan optimal suatu perusahaan akan tercapai apabila terdapat keseimbangan antara manfaat dan komitmen, yang dihasilkan dari penggunaan hutang untuk kebutuhan operasional perusahaan. Menurut Terrania (2020), teori trade-off dapat mempengaruhi struktur modal melalui dua faktor yaitu pajak dan biaya. Premis teori ini adalah penggunaan utang untuk memberikan manfaat pajak. Jika suatu perusahaan menggunakan sejumlah hutang untuk meningkatkan nilainya, maka keuntungannya harus sama atau melebihi pengorbanannya. Namun apabila suatu perusahaan menggunakan hutang untuk meningkatkan nilai perusahaan dan hasilnya tidak sepadan dengan pengorbanannya, hal tersebut tidak diperbolehkan, karena dapat menambah beban perusahaan di luar manfaat yang terkait dengan penggunaan hutang. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengambil keputusan keuangan: apakah lebih baik menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaan untuk mengurangi beban pajak atau menggunakan akumulasi modal atau keuntungan untuk mengurangi hutang.

4. *Signaling Theory (Teori Sinyal)*

Menurut teori signaling, perusahaan mempunyai hak untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak eksternal (Sari, 2018). Teori signaling ini menjelaskan bagaimana cara mengkomunikasikan sinyal berupa informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan nilai bisnis

tersebut. Setelah perusahaan memberikan informasi kepada seluruh pelaku pasar seperti investor, selanjutnya yang dilakukan pelaku pasar adalah mengevaluasi dan menganalisis informasi tersebut untuk mengetahui bagaimana hasilnya, hasilnya merupakan sinyal baik atau buruk (Widianingsih, 2018). Dengan bantuan sinyal yang diterima maka dapat diambil keputusan yang tepat, hal ini dapat merangsang perusahaan untuk meningkatkan labanya, dan ketika laba perusahaan meningkat maka akan mempengaruhi kenaikan harga saham, hal ini juga akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Secara konseptual perlu diidentifikasi prinsip/aturan dasar yang menjadi landasan/asas yang menggambarkan konsep *Good Corporate Governance*. Landasan/prinsip ini dimaksudkan sebagai panduan untuk menggambarkan tindakan dan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik serta sebagai acuan untuk memeriksa keberhasilan penerapan tata kelola publik perusahaan yang baik dalam suatu perusahaan. Secara umum *Good Corporate Governance* mencakup 5 prinsip dasar, antara lain:

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Selain menjaga objektivitas, transparansi tidak hanya mengungkapkan isu-isu yang diwajibkan oleh undang-undang tetapi juga isu-isu penting yang membantu pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya mengambil keputusan yang tepat dan cepat dengan tidak menghilangkan kewajiban untuk melindungi informasi rahasia.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip menjelaskan kinerja secara transparan dan wajar, dengan pengelolaan yang akurat dan terukur, sesuai dengan kepentingan Perusahaan, serta tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (*Checks and Balances System*) dan kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing instansi dalam perusahaan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Prinsip kinerja yang bertanggung jawab, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (kewajiban sosial) untuk aktivitas terkait bisnis, adat istiadat dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan diakui sebagai kewarganegaraan perusahaan yang baik.

4. *Independency* (Kemandirian)

Prinsip pengelolaan Perusahaan yang independen adalah setiap instansi dalam operasionalnya

tidak mempengaruhi dirinya sendiri dan pihak lain tidak ikut campur demi tercapainya prinsip perusahaan yang benar, semua Keputusan diambil atas dasar obyektif untuk menghindari konflik kepentingan.

5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran, keadilan, dan kesetaraan dengan mencakup kesempatan yang sama dalam perekrutan staf, karir dan pelaksanaan tugas profesional mereka tanpa membedakan asal negara, agama, ras, kelas sosial, jenis kelamin dan status kondisi fisik. Dengan mempertimbangkan perbedaan dalam kerangka hukum, pasar, lingkungan, operasi dan sifat spesifik dari kegiatan perusahaan, apa yang diterapkan adalah apa yang tampaknya sesuai dengan bidang kegiatan perusahaan. Bagi BUMN, Kementerian BUMN telah mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 yang mengatur 5 prinsip GCG, yaitu Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran. Dalam meningkatkan dan mengembangkan operasional perusahaan, terkadang kebijakan manajer kurang memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan. Contohnya adalah perusahaan publik yang mencapai sasaran kinerjanya dan sering mengalami PHK sehingga memaksa karyawannya bekerja hingga larut malam dan bekerja pada hari libur. Hal ini hanya disebabkan oleh tercapainya tujuan kinerja perusahaan dan peningkatan laba. Jika hal ini terjadi dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan karyawan maka hal ini sesuai dengan salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu prinsip kesetaraan dan kewajaran. Begitu pula jika terdapat hubungan yang berbanding terbalik antara pertumbuhan perusahaan dengan penurunan kesejahteraan karyawan, maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip kewajaran.

Good Corporate Governance sering kali diartikan sebagai suatu sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Pemilik yang dimaksud bukan hanya pemilik mayoritas tetapi juga masyarakat. Salah satu tujuan utama penerapan tata kelola perusahaan adalah untuk menciptakan suatu sistem yang mampu menjaga keseimbangan pengendalian perusahaan dengan cara meminimalkan risiko kesalahan mengelola, dengan mendorong manajer untuk memaksimalkan efisiensi pemanfaatan aset untuk menciptakan nilai tambah yang optimal bagi perusahaan.

Penerapan GCG yang berkelanjutan akan menarik minat investor. Dalam penerapan GCG pada suatu perusahaan, penting bagi perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang cermat berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi perusahaan serta tingkat kesiapannya agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan dari setiap elemen perusahaan. Secara umum, perusahaan yang telah berhasil menerapkan tata kelola perusahaan yang baik akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap ini meliputi 3 tahap utama:

1. *Awareness Building*

Tahap sosialisasi awal bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya GCG dan komitmen bersama dalam penerapan GCG. Dimungkinkan untuk mencari bantuan dari ahli independen di luar perusahaan. Bentuk kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

2. *Good Corporate Governance Assessment*

Berupaya mengukur atau memetakan status perusahaan saat ini dalam penerapan GCG secara lebih akurat. Penting untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perhatian prioritas dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai hal tersebut.

3. *Good Corporate Governance Manual Building*

Langkah selanjutnya setelah melakukan penilaian. Penyusunan manual mencakup berbagai aspek, seperti Kebijakan *Good Corporate Governance* perusahaan, Pedoman *Good Corporate Governance* bagi Badan Perusahaan, Pedoman Perilaku dan audit, *Audit Committee Charter*, kebijakan transparansi, kerangka dan kebijakan manajemen risiko serta Roadmap Implementasi

b. Tahap Implementasi

Tahap ini meliputi 3 tahap utama:

1. Sosialisasi

Perlu diperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya pedoman tata kelola perusahaan yang baik.

2. Implementasi

Kegiatan dilaksanakan sesuai pedoman tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku saat ini berdasarkan roadmap yang telah disusun. Pendekatan ini harus bersifat *top-down* yang melibatkan dewan dan direksi perusahaan.

3. Lokalisasi

Tahap implementasi jangka panjang. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik ke dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi, sistem kerja, dan peraturan perusahaan.

c. Langkah Evaluasi

Ini adalah langkah yang harus dilakukan secara berkala untuk mengukur seberapa efektif pencapaian praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan meminta pihak ketiga yang independen mengaudit penerapannya dan memberi peringkat pada praktik tata kelola perusahaan yang baik yang ada. Sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Dalam hal membangun tata kelola perusahaan yang baik dan terkait dengan pengembangan sistem yang akan berdampak pada perilaku setiap individu dalam perusahaan, sehingga akan terbentuk budaya perusahaan yang

bernuansa *Good Corporate Governance*.

Secara resmi, pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait GCG, khususnya Keputusan Menteri Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. KEP.23/M-PM.PBUMN /2000 tentang Penerapan Praktik GCG persediaan. Selain itu telah diperbaiki dengan KEP.117/MPM.PBUMN/2002. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu prinsip korporasi yang sehat yang hendaknya diterapkan dalam pengelolaan suatu perusahaan, yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan perusahaan guna mencapai tujuan dan sasarannya. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 8 Tahun 2007 juga mendukung penerapan GCG bagi 55.555 perseroan terbatas.

Contoh penerapan GCG pada perusahaan publik dapat dilihat pada penerapan transparansi pelaporan keuangan, peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan, dan peningkatan keterlibatan pemegang saham. Misalnya, BUMN yang menerapkan GCG dengan baik akan memberikan informasi yang jelas mengenai kinerja operasional dan keuangannya sehingga memberikan kepercayaan kepada investor dan masyarakat. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dapat mencakup kebijakan lingkungan dan program keberlanjutan, sehingga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Memperkuat keterlibatan pemegang saham melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) yang transparan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan secara keseluruhan.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kemajuan perekonomian yang berkelanjutan. Pertama, GCG menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sehingga menciptakan kepercayaan antar pemangku kepentingan. Dengan informasi yang terbuka dan akuntabilitas yang jelas, investasi cenderung lebih stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kedua, GCG membantu perusahaan mengelola risiko dengan lebih baik. Tindakan preventif dan pemantauan yang diterapkan sesuai prinsip GCG membantu mencegah kegagalan manajemen dan kebijakan yang tidak berkelanjutan. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham, namun juga mendukung stabilitas ekonomi, mengurangi dampak krisis, dan mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Terakhir, GCG menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan bertanggung jawab. Melalui kebijakan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan fokus pada tanggung jawab sosial perusahaan, GCG membantu membangun perekonomian yang tidak hanya tumbuh secara finansial namun juga memperhatikan dampaknya terhadap dunia, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, GCG berperan sebagai katalis bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan dan seimbang.

Dapat dikatakan bahwa penerapan GCG dalam suatu perusahaan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan GCG menguntungkan perusahaan dalam melindungi kepentingan investor. Dengan bantuan GCG, proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik sehingga meningkatkan efisiensi dan kesehatan operasional bisnis yang dijalankan.

KESIMPULAN

Ekonomi berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam revolusi pembangunan ini, peran *Good Corporate Governance* (GCG) sangat penting. *Good Corporate Governance* mencakup praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap norma-norma etika. Dalam konteks ekonomi berkelanjutan, GCG menjadi kunci dalam memastikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang.

Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik cenderung memiliki kebijakan berkelanjutan, meminimalkan risiko sosial dan lingkungan, serta berkontribusi pada pembangunan yang inklusif. GCG membantu mengurangi ketidaksetaraan, menghindari eksploitasi sumber daya alam, dan mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan menerapkan GCG dalam operasional dan pengambilan keputusan, perusahaan dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memprioritaskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, perusahaan tidak hanya mencapai keberlanjutan finansial, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan positif dalam revolusi pembangunan menuju masa depan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Tina, Megawati Barthos, and Rineke Sara. "EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM MENDUKUNG EKONOMI KREATIF." *Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2. No. 1. 2023. <https://prosiding.borobudur.ac.id/index.php/1/article/download/47/41>
- Asiah, Nur, Sri Haryanti, and Zulkarnain Zulkarnain. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Program Corporate Social Responsibility." *Winter Journal: Imwi Student Research Journal* 1.1 (2020): 9-21. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2453367&val=23408&title=Penerapan%20Prinsip-Prinsip%20Good%20Corporate%20Governance%20pada%20Program%20Corporate%20Social%20Responsibility/1000>
- Firdaus, Aras, Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, and Rianda Dirkareshza. "Optimalisasi Good Corporate Governance Penguatan Bumh Dalam Perlindungan Keuangan Negara." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1.1 (2022): 96-111. <https://talenta.usu.ac.id/Mahadi/article/view/8317>
- ISMAYANTI, ULFIE DELIA. *IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT (Studi pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016–2018)*. Diss. UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG, 2020. <http://repository.usbypkp.ac.id/1263/>
- Jafar, Sofyan. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/12577>
- Nurkholis, Kgs M., Vhika Meiriasari, and RM Rum Hendarmin. "Analisis Peranan Jati Diri Koperasi Sebagai Wujud Pengimplementasian Good Corporate Governance (GCG) Koperasi di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 14.1 (2023): 51-58. <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/3143>
- Purbawangsa, Ida Bagus Anom, et al. "Corporate governance, corporate profitability toward corporate social responsibility disclosure and corporate value (comparative study in Indonesia, China and

- India stock exchange in 2013-2016)." *Social Responsibility Journal* 16.7 (2020): 983-999. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/srj-08-2017-0160/full/html>
- Poerwanto, Poerwanto, and Yoedo Shambodo. "Revolusi industri 4.0: Googelisasi industri pariwisata dan industri kreatif." *Journal of Tourism and Creativity* 4.1 (2020). <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/tourismjournal/article/view/1695>
- Rahmat, Kamaluddin. "Pengaruh Kinerja Keuangan, Implementasi Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report." *Accounthink: Journal of Accounting and Finance* 7.2 (2020).
- Tyas, Novia Sarwoning. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga Pt. X." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 1.3 (2020): 248-260. <https://dinastirev.org/JEMSI/article/view/106>
- Tyas, Novia Sarwoning, and Erna Imaningsih. "The Analysis Regarding the Consumer Purchase Intentions in using of Halodoc Telemedicine during Pandemic of COVID-19." <https://www.academia.edu/download/65360430/B2301031018.pdf>
- Trida, Trida, et al. "Pengaruh Corporate Sosial Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufacture Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Periode 2015-2019)." (2021).